

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Marwan Hsb, 2017, *Konsep Judicial Review, dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*, Setara Press, Malang.
- Ambeg Paramarta dkk, 2016, *Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta.
- Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerinraha Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Didik Sukriono, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi Daerah, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Enny Nurbaningsih, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2015, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- HM Agus Santoso, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2015 *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan M. Khozim, Nusamedia, Bandung.
- I.C. van der Vlies, 2005, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- I Gde Pantja Aswata, 2013, *Problematika Otonomi Daerah Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Imam Soebechi, 2016, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Irawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- J.J.H Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, (alih bahasa Arief Sidarta), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jum Anggriani, 2011, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta.
- K.C Wheare, 2015, *Konstitusi Konstitusi Modern*, diterjemahkan oleh Imam Baehaqie, Nusa Media, Bandung.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, 2016, *Dasar-dasar Filasafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Tahun 2017, Konsistensi Pada Konstitusi dan Ideologi Negara*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, 2007, *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat MPR RI, Jakarta.
- Makmur, 2015, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawas*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Maria Farida Indriati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenamedia Grup, Jakarta.
- Ni'Matul Huda, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- , 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- , 2009, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematikanya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pokja Laporan Tahunan MARI, 2015, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2015*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Pokja Laporan Tahunan MARI, 2016, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2016*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2000 , *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT. Alex Media Komputendo, Jakarta.

Ryaas Rasyid, 2000, Dalam *Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Harian Umum Suara Pembaruan, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Buku Kedua, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Sirajuddin, dkk, , 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Syaukani, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2016, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo 2014, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Kencana, Jakarta.

Tim Penyusun, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Tim Penyusun, 2011 *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Umbu Rauta, 2016, *Kontitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Yuliandri, 2013, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Perundang-Undangan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Aryojati Ardipandanto, 2016, *Penanganan Perda Bermasalah:Aspek Politik Dan Ketatanegaraan*, Vol. VIII, No. 12/II/P3DI/Juni/2016, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri.

Eka NAM Sihombing, 2017, *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016*, Jurnal Yudisial [ISSN2579-468] Vol. 10 No. 2 Agustus 2017, Jakarta

M. Nur Sholikin, 2017, *Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif Dan Pelaksanaan Hak Uji Materiil MA*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jurnal Rechtsvinding, [ISSN 2089-9009] Jakarta.

Otong Rosadi, 2015, *Konstusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325], Bandung.

Victor Juzuf Sedubun, 2015, *Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2015 ISSN : 2356-4164, Ambon.

Yuniar Kurniawati, 2016, *Polemik Pengujian Peraturan Daerah (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Versus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)*, Jurnal Legislasi Indonesia, ISSN 0216-1338 VOL 13 NO 4 –Desember 2016, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-X/2012

Majalah

Aryojati Ardipandanto, 2016, *Penanganan Perda Bermasalah:Aspek Politik Dan Ketatanegaraan*, Vol. VIII, No. 12/II/P3DI/Juni/2016, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri.

Website

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11779#.WZQQHIUjHI>
U diakses pada 16 Agustus 2017

http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf diakses pada 13 Desember 2017

<http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/21/daftar-pembatalan-3143-perda-masih-perlu-penyempurnaan> diakses pada 13 Desember 2017.

<http://icjr.or.id/dilema-putusan-mk-terkait-kewenangan-pusat-untuk-membatalkan-perda/> diakses pada 14 Desember 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5948f25f3a18f/kppod-kritik-putusan-mk-terkait-pembatalan-perda> diakses pada 14 Desember 2017.

<https://www.youtube.com/watch?v=Q1NQgMwx2W0> diakses pada 22 Februari 2018

<https://www.youtube.com/watch?v=iN3JryRamWA> diakses pada 22 Februari 2018

https://books.google.co.id/books?id=ZUFVDwAAQBAJ&pg=PA1&dq=perencanaan+adalah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiCtt2U_cDaAhVGro8KHWFXB1kQ6AEIJzAA#v=onepage&q=perencanaan%20adalah&f=false diakses pada tanggal 17 April 2018

<http://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/> diakses pada tanggal 23 Maret 2018.

http://dkk.lan.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PN-006_Langkah-Mundur-Deregulasi-Kebijakan-di-Indonesia.pdf. diakses pada 22 Februari 2018

<https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.WrdEui5ubIU> diakses pada tanggal 25 Maret 2018

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/tak-bappenas-usul-pembentukan-komite-regulasi/>

http://e-perda.kemendagri.go.id/eperda/ph_perda.php diakses pada 04 April 2018.

